

**ANALISIS IMPLEMENTASI PELAPORAN KEUANGAN SEKOLAH SEBAGAI
INSTRUMEN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK DI SMP
LABSCHOOL 1 UNESA SURABAYA**

Sara Zakiyyatul Umma¹, Ilyas Adi Saputra², Ahmad Makhasin As Shuffi³, Haikal Ali
Mu'tasim Billah⁴, Adinda Islamatul Nur Aziza⁵, Ima Widiyanah⁶

¹²³⁴⁵Program Studi S1 Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Negeri Surabaya

124010714076@mhs.unesa.ac.id₁, 224010714182@mhs.unesa.ac.id₂,
324010714084@mhs.unesa.ac.id₃, 424010714179@mhs.unesa.ac.id₄,
524010714192@mhs.unesa.ac.id₅, Imawidiyanah@unesa.ac.id₆

ABSTRACT

Financial management in educational institutions plays a crucial role in maintaining smooth school operations while supporting improvements in the quality of learning. This study aims to interpret the implementation of financial reporting as a means of transparency and public accountability at SMP Labschool 1 UNESA Surabaya, as well as to identify obstacles and corrective measures. The approach used was descriptive qualitative through direct observation, interviews with the principal and treasurer, and analysis of the RKAS (Work Plan and Budget) documents and general ledger. The findings indicate that the school has implemented a systematic financial management system based on the Education Quality Report (Rapor Mutu Pendidikan) data in preparing the RKAS. School funds come from SPP (School Fees), central BOS (School Operational Assistance), and regional BOSDA (School Operational Assistance). Obstacles that emerged included human resources' lack of understanding of frequently changing accounting regulations, the risk of manual recording errors, and urgent needs not yet planned for in the initial budget. To address these issues, the school implemented budget efficiency measures, conducted regular monitoring by the foundation, and planned to digitize reporting to strengthen and maintain public trust.

Keywords: *Financial Reporting, Transparency, Public Accountability*

ABSTRAK

Manajemen keuangan di satuan pendidikan memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran operasional sekolah sekaligus mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Studi ini bertujuan mengkaji penerapan pelaporan keuangan sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas publik di SMP Labschool 1 UNESA Surabaya, serta mengidentifikasi hambatan dan langkah perbaikan yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi langsung, wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara, serta analisis dokumen RKAS dan buku kas umum. Temuan menunjukkan bahwa sekolah telah menjalankan

sistem pengelolaan keuangan yang sistematis dan berbasis data Rapor Mutu Pendidikan dalam penyusunan RKAS. Dana sekolah berasal dari SPP, BOS pusat, dan BOSDA daerah. Kendala yang muncul meliputi pemahaman SDM terhadap regulasi akuntansi yang sering berubah, risiko kesalahan pencatatan manual, dan kebutuhan mendesak yang belum terencana dalam anggaran awal. Untuk mengatasinya, sekolah melakukan efisiensi anggaran, pengawasan berkala oleh yayasan, serta merencanakan digitalisasi pelaporan guna memperkuat dan menjaga kepercayaan publik.

Kata Kunci: Pelaporan Keuangan, Transparansi, Akuntabilitas Publik

A. Pendahuluan

Pendidikan memegang peran strategis sebagai fondasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mendorong kemajuan suatu negara. Secara konseptual, pendidikan merupakan proses yang dirancang secara sadar dan sistematis untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Landasan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan nasional tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing, diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai serta pengelolaan anggaran yang profesional. Dalam konteks ini, keuangan sekolah berfungsi layaknya

sirkulasi darah dalam organisasi, yang mendistribusikan sumber daya ke seluruh komponen operasional, mulai dari pengadaan sarana prasarana, pengembangan profesionalisme guru, hingga pelaksanaan pembelajaran sehari-hari. Manajemen keuangan pada dasarnya merupakan aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian terhadap sumber daya keuangan agar dapat digunakan secara optimal (Jaya et al., 2023).

Komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan tercermin melalui alokasi anggaran minimal 20% dari APBN dan APBD sebagaimana diamanatkan konstitusi. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan tersebut adalah penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pemerintah pusat dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) oleh pemerintah daerah.

Program bantuan ini bertujuan meringankan beban biaya pendidikan masyarakat dalam rangka menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun, sekaligus membantu satuan pendidikan memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Dalam kerangka manajemen publik, pengelolaan keuangan pendidikan harus berpedoman pada prinsip. Empat pilar utama yang mendasari prinsip ini adalah transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Transparansi menuntut sekolah untuk membuka akses informasi keuangan secara jujur kepada seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, akuntabilitas mengharuskan sekolah mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran dana secara sah, rasional, dan selaras dengan target peningkatan mutu. Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, menurunnya kepercayaan publik, serta risiko penyimpangan yang dapat merusak reputasi institusi. Padahal, manajemen keuangan seharusnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui pengelolaan dana yang tepat guna (Arifianty, 2023)

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan keuangan sekolah masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan agar dana yang dimiliki sekolah dapat digunakan secara efektif dan efisien, serta untuk menghindari kesalahan dalam penggunaannya (Sukma & Nasution, 2022). Sebagian besar satuan pendidikan mengalami kesulitan administratif akibat keterbatasan kompetensi SDM pengelola keuangan, perubahan regulasi yang dinamis, serta ketergantungan pada sistem pencatatan manual. Kondisi ini menyebabkan penyusunan laporan keuangan sering terlambat, kurang akurat, dan cenderung hanya memenuhi tuntutan formalitas birokrasi tanpa memberikan informasi yang bermakna bagi pemangku kepentingan internal, seperti orang tua dan komite sekolah.

SMP Labschool 1 UNESA Surabaya merupakan salah satu sekolah menengah unggulan di Kota Surabaya yang berada di bawah naungan Yayasan Dharma Wanita Universitas Negeri Surabaya. Sebagai lembaga swasta modern, sekolah ini memiliki pola pengelolaan anggaran

yang kompleks karena mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan, yaitu dana mandiri dari masyarakat melalui SPP, dana BOS dari pemerintah pusat, serta dana BOSDA dari pemerintah daerah. Kompleksitas tersebut menuntut tanggung jawab ganda bagi manajemen sekolah. Selain wajib mematuhi sistem pelaporan pemerintah melalui aplikasi ARKAS, pihak sekolah juga perlu menyajikan laporan keuangan yang kredibel kepada yayasan dan orang tua siswa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi pelaporan keuangan sekolah dalam konteks alamiahnya, dengan peneliti sebagai instrumen utama pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada proses, makna, dan dinamika penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah yang tidak dapat diukur secara numerik semata.

Penelitian dilaksanakan di SMP Labschool 1 UNESA Surabaya pada bulan April 2026 melalui pemilihan

lokasi secara purposif berdasarkan tiga pertimbangan: kompleksitas pengelolaan dana dari berbagai sumber (BOS, iuran Komite, dan yayasan), keterbukaan akses data lapangan, serta relevansinya sebagai sekolah di bawah naungan universitas negeri yang dituntut memiliki tata kelola keuangan yang akuntabel. Informan utama terdiri dari Kepala Sekolah dan Bendahara SMP Labschool 1 UNESA Surabaya, dipilih atas dasar kompetensi teknis dan keterlibatan langsung dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Informan pendukung meliputi perwakilan Komite Sekolah dan orang tua siswa sebagai pihak penerima manfaat transparansi keuangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi: wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi terstruktur terhadap sistem pencatatan dan mekanisme pelaporan keuangan, serta studi dokumentasi terhadap dokumen resmi seperti RKAS, laporan pertanggungjawaban, buku kas umum, dan bukti transaksi. Analisis data mengikuti model interaktif (Miles et al., 2014) yang meliputi reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan antara kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah, serta triangulasi metode dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara terintegrasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Pelaporan Keuangan Sekolah

Pelaporan keuangan sekolah merupakan proses penyusunan dan penyajian informasi keuangan yang menggambarkan seluruh aktivitas pengelolaan dana pendidikan secara sistematis. Laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap penggunaan dana dari berbagai sumber, seperti pemerintah (BOS), yayasan, dan masyarakat

Pelaporan keuangan sekolah disusun secara periodik dan mencakup laporan penggunaan dana, penerimaan dan pengeluaran kas, serta laporan realisasi anggaran. Penyusunannya harus mengacu pada standar akuntansi yang berlaku agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan digunakan dalam

pengambilan keputusan. Dengan demikian, pelaporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik.

2. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah

Manajemen keuangan sekolah merupakan proses pengelolaan dana pendidikan yang harus dilakukan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Terdapat empat prinsip utama yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan sekolah, yaitu: transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. (Rahmah, 2016)

Transparansi adalah keterbukaan sekolah dalam menyajikan informasi keuangan kepada pihak terkait secara jelas, mudah diakses, dan dapat dipahami masyarakat. Akuntabilitas merupakan kewajiban sekolah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pihak yang berkepentingan, di mana setiap penggunaan anggaran harus dapat dijelaskan dan sesuai perencanaan. Efektivitas menekankan bahwa penggunaan dana harus mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan, sedangkan

efisiensi berarti penggunaan dana dilakukan secara hemat dan tepat guna tanpa mengurangi kualitas hasil. Manajemen keuangan sekolah mencakup proses pengelolaan sumber daya keuangan secara sistematis, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan, guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Pengelolaan ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai peraturan yang berlaku (Sukma & Nasution, 2022).

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

SMP Labschool Unesa 1 merupakan lembaga pendidikan tingkat menengah pertama yang berorientasi pada pengembangan potensi akademik, karakter, serta keterampilan siswa yang selaras dengan tuntutan perkembangan zaman. Sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Dharma Wanita Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dan berlokasi di Surabaya, sehingga memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan akademik perguruan tinggi serta ekosistem pendidikan yang berkualitas.

Dari aspek historis, SMP Labschool Unesa 1 merupakan bagian dari pengembangan lembaga pendidikan yang terintegrasi dengan Universitas Negeri Surabaya. Sekolah ini didirikan sebagai bentuk kontribusi UNESA dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah, khususnya dalam mencetak generasi yang unggul secara akademik maupun berkarakter. Seiring perkembangannya, SMP Labschool Unesa 1 terus berinovasi dalam kurikulum, metode pembelajaran, serta penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila.

Kondisi pengelolaan keuangan sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah, yaitu transparan, akuntabel, dan terencana. Sumber pendanaan sekolah berasal dari dana pemerintah pusat (BOS), pemerintah daerah (BOSDA), serta kontribusi masyarakat seperti SPP. Pengelolaan keuangan dirancang melalui RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang disusun setiap awal tahun ajaran. Pengalokasian dana difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan sarana prasarana, serta kegiatan siswa. Selain itu, pengawasan dan evaluasi

keuangan dilakukan secara berkala oleh pihak yayasan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Hasil Penelitian

1. Sistem Pengelolaan Keuangan SMP 1 Labschool UNESA

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung di SMP 1 Labschool UNESA, diperoleh gambaran bahwa sekolah ini telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur dan mengikuti regulasi yang berlaku. Sebagai sekolah swasta yang berada di bawah naungan yayasan, SMP 1 Labschool UNESA mengelola keuangannya secara mandiri namun tetap terikat pada ketentuan pemerintah, khususnya dalam penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah. Pengelolaan keuangan sekolah ini melibatkan dua pihak utama, yaitu Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab kebijakan dan Bendahara sebagai pelaksana teknis keuangan sehari-hari.

2. Sumber Dana Sekolah

Sumber pendanaan SMP 1 Labschool UNESA berasal dari tiga sumber utama yang secara konsisten

diterima setiap tahunnya. Pertama, dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang merupakan iuran rutin bulanan dari peserta didik. Dana ini menjadi sumber pemasukan utama yang digunakan untuk mendukung operasional sekolah, termasuk untuk penggajian guru melalui yayasan. Kedua, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari pemerintah pusat dan dicairkan setiap bulan. Ketiga, dana pendamping BOS yang berasal dari pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan tambahan dari pemerintah kota.

Bendahara sekolah menegaskan bahwa kedua dana yang berasal dari pemerintah tersebut telah dilengkapi dengan petunjuk teknis (juknis) yang mengatur secara rinci peruntukannya. Oleh karena itu, pihak yayasan tidak dapat mengubah atau mengalihkan penggunaan dana tersebut di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berstatus sekolah swasta, SMP 1 Labschool UNESA tetap tunduk pada mekanisme penggunaan dana publik yang berlaku. Selain ketiga sumber tersebut, sekolah juga memiliki akses terhadap Program Indonesia Pintar

(PIP) bagi siswa yang memenuhi kriteria, meskipun pencairannya hanya dilakukan satu kali dalam setahun dan tidak mencakup seluruh peserta didik.

3. Proses Perencanaan Keuangan (RKAS)

Proses perencanaan keuangan di SMP 1 Labschool UNESA dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada Rapor Mutu Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan setiap tahun. Rapor Mutu Pendidikan ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang memotret kondisi dan kualitas pendidikan di sekolah secara menyeluruh, sehingga hasil dari rapor tersebut dijadikan dasar untuk menentukan prioritas kebutuhan dan arah penggunaan anggaran pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sekolah kemudian menyusun Rencana Anggaran Pembelanjaan Sekolah (RAPBS) yang mencakup seluruh kebutuhan operasional sekolah. Rencana anggaran ini disusun setiap tahun dan memuat komponen pembiayaan secara menyeluruh, antara lain gaji guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan kegiatan akademik maupun non-akademik, serta biaya

pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Dalam proses penyusunan anggaran, Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa salah satu tantangan yang kerap dihadapi adalah munculnya kebutuhan mendesak yang sebelumnya tidak teridentifikasi dalam perencanaan awal. Untuk menghadapi situasi tersebut, solusi yang diterapkan adalah melakukan efisiensi pada kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, atau dalam kondisi tertentu, menghapus kegiatan yang dinilai kurang prioritas demi memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak.

4. Pelaksanaan Keuangan

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana SPP dijalankan melalui mekanisme yang telah berjalan secara rutin. Pembayaran SPP diterima oleh kasir sekolah, kemudian direkap secara berkala oleh bendahara, dan setiap bulan disetorkan kepada pihak yayasan. Selanjutnya, yayasan bertanggung jawab dalam proses penggajian seluruh guru dan tenaga kependidikan sekolah. Alur ini berjalan secara konsisten dan terstruktur guna menjamin kelancaran operasional sekolah dari sisi pembiayaan.

Dari sisi pencatatan, sekolah menggunakan kartu SPP sebagai bukti resmi atas setiap transaksi pembayaran dari peserta didik. Untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental, seperti Kegiatan Tengah Semester (KTS) dan ujian akhir sekolah, pencatatan dilakukan menggunakan kuitansi sebagai dokumen pendukung. Setiap pengeluaran yang terjadi dicatat secara rinci dalam laporan keuangan yang kemudian direkap bersama dengan laporan gaji secara periodik. Sistem pencatatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh arus keuangan sekolah terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Kendala yang paling nyata dirasakan dalam pelaksanaan keuangan sehari-hari adalah tingginya angka tunggakan SPP dari peserta didik. Hasil kunjungan rumah (home visit) yang dilakukan oleh pihak sekolah mengonfirmasi bahwa sebagian siswa yang menunggak berasal dari keluarga yang secara ekonomi belum mampu. Sebagai solusi, sekolah memanfaatkan dana dari pemerintah kota yang diperuntukkan bagi siswa kurang

mampu, dan saat ini terdapat 15 siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan tersebut.

5. Pengawasan dan Transparansi Keuangan

Pengawasan keuangan di SMP 1 Labschool UNESA dilakukan melalui mekanisme pelaporan yang berjenjang. Laporan keuangan sekolah dipublikasikan secara internal kepada seluruh guru dan staf sekolah, serta secara resmi dilaporkan kepada Dinas Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana, khususnya dana yang bersumber dari pemerintah.

Terkait transparansi kepada orang tua peserta didik, sekolah menerapkan keterbukaan informasi sejak awal proses penerimaan siswa baru. Informasi mengenai kebutuhan pendanaan sekolah disampaikan saat promosi dan dimuat dalam rincian tagihan yang diberikan kepada orang tua di awal masuk. Untuk penggunaan dana BOS, transparansi dilakukan kepada wali murid mengingat sifatnya yang merupakan dana publik. Sementara itu, pengelolaan dana SPP bersifat internal karena merupakan bagian dari mekanisme keuangan yayasan, sehingga tidak dipublikasikan secara terbuka kepada

wali murid. Secara keseluruhan, sistem pengawasan yang diterapkan di SMP 1 Labschool UNESA mencerminkan upaya sekolah untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan sekolah, meskipun sebagai sekolah swasta terdapat batasan tertentu dalam hal keterbukaan informasi keuangan kepada pihak eksternal.

Kesesuaian Implementasi

Pelaporan Keuangan dengan Teori Manajemen Keuangan Pendidikan

Pembahasan ini bertujuan menganalisis temuan lapangan terkait implementasi pelaporan keuangan di SMP 1 Labschool UNESA dengan mengaitkan pada teori manajemen keuangan pendidikan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Berdasarkan teori manajemen keuangan sekolah menurut Mulyasa (2017), tahapan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa SMP 1 Labschool UNESA telah menjalankan ketiga tahapan tersebut.

Tahap Perencanaan: Kepala Sekolah menyatakan penyusunan RAPBS mengacu pada rapor mutu pendidikan dari Kemendikbudristek.

Hal ini sejalan dengan prinsip budgeting based on data dalam manajemen keuangan pendidikan modern, di mana anggaran disusun berdasarkan evaluasi kinerja sekolah, bukan sekadar historis. Penggunaan rapor mutu sebagai dasar menunjukkan adanya upaya evidence-based planning. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan diskusi internal bersama tim manajemen untuk memprioritaskan program yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada peningkatan mutu belajar siswa.

Tahap Pelaksanaan:

Bendahara menjelaskan alur penerimaan SPP melalui kasir, direkap, lalu disetor ke Yayasan untuk penggajian guru. Untuk dana BOS dan BOSDA, penggunaannya terikat juknis pemerintah dan tidak dapat diubah Yayasan. Prosedur ini sesuai dengan asas sentralisasi keuangan yayasan pada sekolah swasta dan prinsip earmarking pada dana bantuan pemerintah. Proses pencairan dan penyaluran dana juga dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan riil di lapangan agar arus kas sekolah tetap sehat.

Tahap Pengawasan: Pelaporan dilakukan ke Dinas Pendidikan dan

menggunakan kuitansi/kartu SPP sebagai bukti transaksi. Pencatatan setiap pengeluaran juga direkap bersama gaji. Praktik ini memenuhi unsur accountability dalam teori, yaitu adanya pertanggungjawaban administratif secara berjenjang. Pengawasan juga dilakukan secara internal oleh yayasan secara mendadak atau insidental untuk memastikan semua prosedur berjalan sesuai aturan.

Analisis Pelaporan Keuangan sebagai Instrumen Transparansi Publik

Transparansi publik dalam konteks sekolah swasta berarti keterbukaan informasi keuangan kepada stakeholder utama, terutama orang tua sebagai penyandang dana. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan dua pola transparansi yang diterapkan di SMP 1 Labschool UNESA.

Pertama, transparansi bersyarat untuk dana SPP. Kepala Sekolah menyebut transparansi dilakukan melalui “kesepakatan di awal” saat promosi sekolah dan penyampaian kebutuhan pendanaan yang disertakan dalam tagihan awal peserta didik. Bendahara menegaskan bahwa penggunaan

dana SPP bersifat internal dan tidak dipublikasikan ke wali murid. Praktik ini menunjukkan transparansi terbatas. Sesuai teori transparansi, publik berhak tahu penggunaan dana yang bersumber dari mereka. Namun, karena status swasta, sekolah hanya membuka data SPP di awal kontrak pendidikan. Model ini dapat diterima selama ada informed consent, namun berpotensi menimbulkan asimetri informasi jika tidak ada laporan berkala.

Kedua, transparansi penuh untuk dana pemerintah. Bendahara menyatakan penggunaan dana BOS dan BOSDA disampaikan ke wali murid dan pencairannya setiap enam bulan sekali. Laporan juga disampaikan ke Dinas Pendidikan. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik dalam Permendikbud No. 63 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana BOS, yang mewajibkan sekolah mempublikasikan penggunaan dana BOS kepada warga sekolah. SMP 1 Labschool UNESA telah memenuhi kewajiban regulasi tersebut. Informasi ini biasanya disampaikan melalui papan pengumuman sekolah atau grup komunikasi orang tua dan guru.

Analisis Pelaporan Keuangan sebagai Instrumen Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Temuan lapangan menunjukkan dua bentuk akuntabilitas yang diterapkan.

Akuntabilitas Vertikal: Sekolah melaporkan penggunaan dana ke Dinas Pendidikan dan Yayasan. Bukti transaksi dicatat dan direkap. Ini merupakan bentuk akuntabilitas administratif kepada pemerintah dan yayasan sebagai otoritas di atasnya. Laporan ini menjadi dasar evaluasi kinerja sekolah setiap tahunnya dan menjadi syarat mutlak agar bantuan dana dari pemerintah pada tahun berikutnya tetap cair dan berkelanjutan.

Akuntabilitas Horizontal: Kepada orang tua, akuntabilitas hanya diberikan untuk dana BOS/BOSDA. Untuk dana SPP, akuntabilitas diganti dengan “kesepakatan awal”. Dari 302 siswa, terdapat 15 siswa tidak mampu yang dibiayai BOSDA, menunjukkan adanya akuntabilitas sosial melalui subsidi silang. Implementasi akuntabilitas di SMP 1 Labschool UNESA sudah berjalan, namun

bersifat diskriminatif berdasarkan sumber dana. Menurut teori good school governance, akuntabilitas idealnya mencakup seluruh sumber dana. Namun demikian, kepercayaan orang tua tetap terjaga karena adanya bukti nyata berupa fasilitas yang memadai dan proses belajar mengajar yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah dijanjikan dan disepakati bersama sejak awal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Labschool 1 UNESA Surabaya, dapat disimpulkan bahwa sekolah telah menerapkan sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan yang terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dana sekolah bersumber dari SPP, BOS Pusat, dan BOSDA Daerah, dengan perencanaan anggaran yang disusun berbasis data Rapor Mutu Pendidikan. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah berjalan baik, namun penerapannya dibedakan berdasarkan sumber dananya dana pemerintah dilaporkan dan dipublikasikan secara terbuka, sedangkan dana SPP dikelola secara internal yayasan dengan kesepakatan di awal. Kendala yang dihadapi

meliputi pemahaman SDM terhadap regulasi yang berubah, risiko kesalahan pencatatan manual, serta kebutuhan mendadak di luar rencana anggaran. Untuk mengatasinya, sekolah melakukan efisiensi anggaran, pengawasan berkala, dan berencana melakukan digitalisasi laporan agar tata kelola keuangan semakin akuntabel dan menjaga kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianty, A. M. E. S. A. H. Pu. (2023). *Manajemen Keuangan*.
- Jaya, A., Kuswandi, S., & Prasetyandari, C. W. (2023). *Manajemen keuangan*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publication.
- Rahmah, N. (2016). Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Sekolah. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 1, 73–77.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sukma, A. H. B., & Nasution, A. M. (2022). Manajemen Keuangan Sekolah dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan di Bekasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 45–57. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v4i1.226>